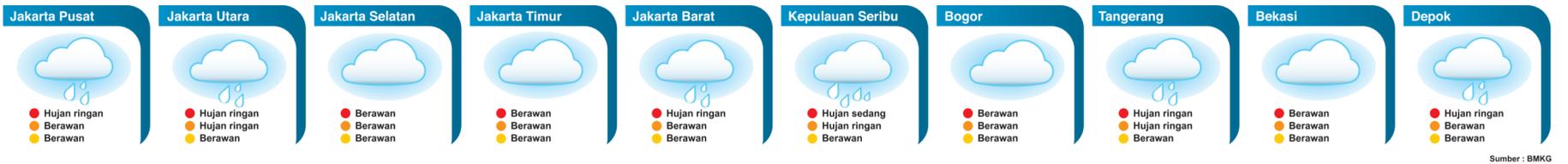


Cuaca Jakarta dan Sekitarnya ● PAGI (00.05 - 12.00) ● SIANG (12.05 - 18.00) ● MALAM (18.05 - 24.00)



Alokasi Dana non-RSBI Timpang

FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya ketimpangan dalam pengalokasian anggaran untuk program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI) dengan sekolah standar nasional (SSN).  
RSBI atau SBI mendapat alokasi anggaran yang lebih besar daripada SSN. Padahal RSBI dan SBI jumlahnya lebih sedikit dibandingkan SSN. Selain itu, RSBI dan SBI biasanya juga memungut uang yang cukup besar dari para siswa.  
"Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp289 miliar untuk RSBI atau SBI. Sementara untuk sekolah standar nasional, pemerintah hanya memberikan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar," kata Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafi dalam keterangan persnya, kemarin.

Pemerintah memberikan bantuan alokasi anggaran sebesar Rp192 juta untuk satu SD bertaraf internasional. Sementara untuk SD bertaraf nasional hanya Rp128 juta. Selain itu, alokasi anggaran untuk pembinaan menuju SBI, pemerintah memberikan bantuan per sekolah sebesar Rp253 juta.

Sementara alokasi anggaran untuk pembinaan menuju sekolah standar nasional, pemerintah hanya memberikan alokasi anggaran sebesar Rp73 juta satu sekolah.

"Kami meminta kepada DPR dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk melakukan kajian ulang terhadap RSBI atau SBI," tegas Uchok.

Bahkan bila perlu, program RSBI atau SBI dihentikan saja karena melukai rasa keadilan dan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Saat dihubungi terpisah, Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Suyanto menyatakan keberadaan RSBI merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga program itu tidak bisa dihentikan.

Pihaknya masih melakukan evaluasi lebih lanjut tentang RSBI melalui Balitbang Kemendiknas. (\* / Bay / J-2)

Pemberian Hibah Perlu Ditata Lagi

Sebagian Penerima Hibah APBD DKI 2011

Nama	Besar
Alex Asmasubrata Management	Rp2 miliar
Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) DKI Jakarta	Rp1 miliar
Akademi Jakarta	Rp750 juta
Gedung Kesenian Wayang	Rp200 juta
Yayasan Pemuda Madani	Rp50 juta
Yayasan Pemuda Inovatif	Rp50 juta
Yayasan Pemuda Kreatif	Rp50 juta
Yayasan Pravitasari	Rp50 juta
Yayasan Pusdok Sastra HB Jassin	Rp50 juta
Yayasan Danong Fathur Rasyid	Rp50 juta
Yayasan Bumi Jaya Sangga	Rp50 juta
Yayasan Siri Ghani Lahila	Rp50 juta
Yayasan Ibnu Abbas	Rp50 juta
Yayasan Pengabdian Putra Jakarta	Rp50 juta
Yayasan Karya Insan Teladan	Rp50 juta
Yayasan Anak Soleh Pesanggrahan	Rp50 juta
Yayasan Azmuna	Rp50 juta
PT Banda Tiba	Rp35 juta
Lembaga Demokrasi untuk Kemakmuran dan Perdamaian	Rp35 juta
KNPI Jakarta Selatan	Rp35 juta
Forum Komunikasi Pemuda (FKP)	Rp25 juta
Himpunan Persaudaraan Pemuda Pelajar Pencinta Alam (Hipperpala) Indonesia	Rp25 juta
Yayasan Haudhiyah Alwathoniayah Jatinegara	Rp25 juta
Majelis Taklim Uliatdatul Jhanah	Rp25 juta

Total dana hibah: Rp924 miliar



Pemberian dana hibah cenderung dilakukan berdasarkan kepentingan politis semata.

SELAMAT SARAGIH

TIMPANGNYA pemberian dana hibah yang diterima yayasan atau lembaga kemasyarakatan dari Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI membuka tabir buruknya pengalokasian dana tersebut.  
Dana yang harusnya dibagikan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung program Pemprov DKI malah dijadikan ajang bagi-bagi dana terkait kepentingan kelompok atau politis. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan atau penataan lagi pemberian dana hibah di masa mendatang.

Pemberian dana bagi PDS HB Jassin sebesar Rp50 juta dan

Alex Asmasubrata Management (AAM) menjadi contoh adanya ketimpangan pengalokasian dana hibah. Sebuah lembaga yang penting bagi perkembangan dunia kesusastraan Indonesia harus kalah dengan kepentingan dari mantan pembalap nasional.

Pengamat politik dan pembangun Jakarta Amir Hamzah bahkan mengatakan pengalokasian dana hibah sebesar Rp924 miliar itu cenderung melanggar sejumlah aturan yang ada. Seperti Peraturan Pemerintah (PP) No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13/2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2011.

"Oleh karena itu kita minta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya melakukan audit terhadap dana hibah yang mencapai hampir Rp1 triliun itu," kata Amir di Jakarta, kemarin.

Bila nanti ada pelanggaran, BPK wajib menindaklanjuti-

nya dengan menyerahkan hasil temuannya kepada aparat hukum.

Amir mengungkapkan keheranannya atas sikap Pemprov DKI dan DPRD yang terus melakukan alokasi dana bagi AAM. Apalagi pada tahun sebelumnya AAM mendapatkan dana Rp4 miliar. Kritik terhadap buruknya pengalokasian dana hibah juga datang dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

"DPRD DKI yang berwenang dalam bantuan sosial dalam APBD DKI tersebut hanya mementingkan faktor kepentingan politis dalam pembagian bansos. Jadi kerap DPRD justru membantu yayasan-yayasan bodong, yakni yayasan yang tidak jelas kerjanya," ungkap Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Hendrik Sirait mengatakan bahwa DPRD bersama Pemprov DKI harus bijak dalam mengalokasikan dana bagi masyarakat. Apalagi dana itu sumbernya

juga dari masyarakat. "Jangan semau-maunya mengalokasikan anggaran bantuan lantaran kepentingan segelintir orang saja," ujar Hendrik.

Depdagri ikut dituding

Kesalahan dalam pengalokasian anggaran ternyata juga tidak hanya kesalahan dari Pemprov dan DPRD DKI. Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) diduga secara bersama melanggar PP No 79/2006 tentang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Kelalaian Depdagri, menurut Amir, karena ada Keputusan Mendagri No 903-30/2011 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta. Semestinya jika menemukan anggaran yang tidak sesuai aturan, Mendagri langsung membatalkannya.

"Keputusan yang dibuat Mendagri dilanggar sendiri, maka diduga ada unsur kesengajaan yang harus diusut dari sisi tindak pidana korupsi, baik dilakukan KPK atau Kejaksaan Tinggi DKI," tandasnya. (SN/J-2)

selamat@mediaindonesia.com

Gadis Remaja itu Butuh Dermawan

KAKI dan bahu kanan FS, 16, mengalami patah tulang. Gadis berkulit putih itu dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara, sejak Selasa (22/3).

FS yang berhidung mancung nyaris tidak bisa menggerakkan tubuhnya. "Sakit sekali. Jangan dipegang," kata salah satu penumpang Mitsubishi Pajero B 11 HMB yang terjun bebas di Km 24 Tol Pluit-Grogol, Selasa (22/3) dini hari.

Akibat kecelakaan itu, 2 orang tewas dan 5 perempuan berusia 16 dan 17 tahun mengalami luka parah. Pengendara mobil, Hamed Bahrun, 51, warga Petamburan, Jakarta Pusat, menghembuskan napas terakhirnya di tempat kejadian.

Sedangkan Abubakar, 39, warga KS Tubun, Jakarta Pusat, yang duduk di belakang bersama salah seorang perempuan, sempat dirawat di Rumah Sakit Atma Jaya, Pluit, Jakarta Utara, tetapi nyawanya juga tidak tertolong.

Cedera terparah dialami FS, 16, dan SW, 17. Mereka dirawat di ruang yang sama. SW mengalami patah tulang di bagian paha, tetapi mulai leluasa menggerakkan tubuhnya, sedangkan LP, 17, ML, 17, dan AA, 17, sudah pulang ke rumah.

Meski kaki dan bahu kanan FS patah tebu, pihak rumah sakit belum memasang gips di tubuh gadis berambut panjang itu. Pemilik tubuh sintal dengan tinggi badan sekitar 155 cm itu mengaku tak lagi bersekolah. Setelah lulus SMP,

orang tuanya tak memiliki dana untuk membiayai masuk ke jenjang SMA. "Jadilah saya sebagai penyanyi di sebuah tempat di Tanjung Priok," tutumnya.

FS berharap mendapat perhatian dari dermawan karena keluarganya tidak sanggup untuk menanggulangi biaya yang kemungkinan sampai puluhan juta rupiah. Sebagai langkah darurat, wartawan dari sebuah penerbitan Ibu Kota menalangi dulu pembelian obat untuk korban.

Kasatlantas Polres Jakut Komisaris Adhie Santika, kemarin, menyatakan Hamed meninggal karena benturan keras di dada. Mobil terjun dari ketinggian 10 meter. "Ada keterangan saksi bahwa mereka banyak minum," ujarnya.

Relasi antara para remaja dengan Hamed dan Abubakar sedang didalami kepolisian. "Tentu yang menjadi fokus kami adalah penyebab kecelakaan," jelas Komisaris Didiek Soemarno, Kaunit Kecelakaan Polres Jakut.

Kelima remaja perempuan akan dimintai keterangan sebagai saksi. Polisi sudah melayangkan surat panggilan. Pemeriksaan pertama akan dilakukan kepada tiga remaja yang sudah pulang ke rumah.

Pada saat kecelakaan, menurut Humas Polsek Metro Penjarangan Ajun Komisaris Teddy, korban Abubakar dan salah satu perempuan hanya berpakaian dalam. Di dalam mobil itu juga ditemukan obat kuat. (\* / J-1)



TIKUNGAN MAUT: Taksi terperosok di gorong-gorong jalan Graha Raya Pondok Kacang, Tangerang Selatan, kemarin. Kejadian ini merupakan kali kedua. Sebelumnya sebuah taksi lain juga masuk ke gorong-gorong tersebut.

Nico Ditetapkan Jadi Produsen Narkoba

POLISI memperoleh bukti baru dalam kasus kepemilikan narkoba dan penembakan bus Trans-Jakarta dengan tersangka Nico alias Siang Fuk. "Ya, kami tambahkan pasal sebagai produsen narkoba, bukan sekadar pengedar," kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Andap Budi Revianto kepada Media Indonesia, kemarin.

"Kami tambahkan pasal sebagai produsen narkoba, bukan sekadar pengedar."

Andap Budi Revianto  
Kapolres Jakarta Utara

Pasal sebagai produsen narkoba tersebut ditambahkan setelah polisi memperoleh bukti baru yaitu ditemukannya pabrik narkoba rumahan yang terletak tidak jauh dari tempat tinggal Nico. "Home industry narkoba tersebut diduga milik dia (Nico)," sebut Andap.

Bukti baru yang dimaksud Andap adalah sebuah tempat yang berjarak 2 kilometer dari lokasi penangkapan Nico di Perumahan Mediterania Golf, Jl Kenari Raya No 15, Penjaringan, Jakarta Utara.

Saat menangkap Nico, polisi menemukan 11.650 butir pil ekstasi, 957 gram sabu, 2.737 happy five, dan prekursor seberat 55 kg. Selain itu, ada 1 pen gun, 2 senjata rakitan jenis revolver, dan berbagai jenis senjata tajam sebanyak 47 buah. Di rumah itu juga ditemukan uang tunai sebesar Rp101 juta yang diduga sebagai hasil dari penjualan narkoba.

Sementara itu, lokasi baru yang tidak jauh dari lokasi pertama diduga dijadikan sebagai tempat Nico memproduksi inex. "Nanti kami akan mengekspos tempat tersebut lebih lengkap," sebut Andap.

Polisi membagi kasus Nico menjadi dua berkas. Berkas pertama adalah kasus pidana umum karena menembak bus Trans-Jakarta, serta memiliki senjata tajam dan senjata api. Adapun berkas kedua yakni kasus narkoba, karena ditemukan sabu, happy five, dan bahan baku narkoba. Keduanya sudah dikirim ke kejaksaan namun belum ada yang dinyatakan lengkap.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman menyatakan akan menelusuri kebenaran Nico sebagai produsen narkoba. "Hal itu berdasarkan ditemukannya bahan baku pembuatan narkoba," kata Sutarman. (FD/J-3)



PABRIK SABU: Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Anjan Pramuka Putra menunjukkan berbagai barang bukti peralatan pembuatan sabu di Ruko Megah Blok B No 9, Jl Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat, kemarin. Pabrik sabu tersebut mampu menghasilkan sekitar 4 kilogram sabu dengan omzet Rp18 miliar.

Napi LP Wanita Kontrol Pabrik Sabu

POLISI menggerebek rumah toko (ruko) di perumahan mewah di Kalideres, Jakarta Barat, yang dijadikan tempat pembuatan narkoba jenis sabu.

Menurut Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Anjan Pramuka Putra, pabrik narkoba tersebut merupakan bagian dari jaringan narkoba internasional yang dikendalikan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang.

Saat menggerebek ruko yang beralamat di Jl Peta Selatan, Blok B9, Kalideres, pada Selasa (22/3) malam, polisi hanya menemukan barang bukti berupa sabu seberat 20 gram, sabu cair 200 ml, fosfor merah 2,2 kg, serbuk hitam 2 kg, kristal NaOH seberat 15 kg, serbuk kristal hitam 1 kg, dan alat serta bahan pembuat sabu lainnya.

Sementara itu, penghuni ruko yang bernama Hasmin alias Aseng alias Yadi, 35, kabur melalui jendela di lantai tiga ruko tersebut. "Ia sempat kabur melalui pintu belakang salah satu swalayan, dan berhasil ditangkap di rumah kos di daerah Jelambar," kata Anjan.

Aseng ialah residivis yang pernah mendekam di LP Nusakambangan selama satu tahun karena kasus kepemili-

kan narkoba. Saat diperiksa, ia mengaku memproduksi narkoba sejak Januari 2011.

Selama tiga bulan tersebut tersangka mengaku sudah menghasilkan 4 kg sabu senilai Rp18 miliar yang diedarkan ke beberapa kota besar di Jawa dan Sumatera. Atas perbuatannya, Aseng dijerat Pasal 113 ayat 2, UU RI No 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati.

Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap bahwa Aseng mendapatkan bahan baku dari seorang penghuni LP Wanita Tangerang berinisial FI. "Napi ini menyediakan bahan baku sabu, dia yang memiliki jaringan penyuplai bahan bakunya," sebut Anjan.

Tak hanya itu, jaringan itu diduga merupakan jaringan internasional karena berdasarkan pemeriksaan terungkap bahwa pemodalnya berada di Belanda. "Penyuplai dananya seorang WNI yang menetap di Belanda yang memang sudah masuk daftar pencarian orang sejak lama. Kami sudah mengetahui identitasnya dan bekerja sama dengan Interpol untuk menangkapnya," ujar Anjan. (FD/J-3)